



DAFTAR PERTANYAAN

“WEBINAR NASIONAL PEMBERDAYAAN MENGUATKAN USAHA KOMUNITAS”

Ditujukan kepada Ryan Thanoesya – KKI Warsi

1. Gust Saliem : Berapa lama untuk membangun kelompok sehingga bisa menghasilkan satu produk kelompok yang bisa diterima pasar yang lebih luas?

Jawaban : Tidak ada angka yang benar-benar baku, karena sangat bergantung pada kondisi kelompok, komoditas, dan pasar yang dituju. Namun, berdasarkan pengalaman berbagai program pengembangan usaha komunitas, termasuk kelompok tani dan KUPS, umumnya dibutuhkan sekitar 2–5 tahun hingga sebuah kelompok mampu menghasilkan produk yang diterima oleh pasar yang lebih luas secara berkelanjutan.

Namun beberapa kelompok yang didampingi dengan pendekatan model yang Warsi bangun dalam 2 tahun terakhir dari identifikasi awal 2024 hingga 2025 dan 2026 ini produk sudah masuk ke pasar, walaupun tentu saja perlu peningkatan dan pengembangan usaha lagi ke depan.

Contoh: KUPS Tarusan Dalam Mandiri yang mulai dibangun tahun 2024, saat ini sudah ada produksi kopi dan bekerjasama dengan Su.Ca roastery. Begitu pun KUPS Agam Maju bersama di Bungo mulai usaha dari awal 2025 saat ini sudah bekerjasama dengan mitra 67 toko di dalam dan sekitar desa.

2. Fitria : Bagaimana cara nya kelompok kita dapat pendampingan dari WARSI ? Apakah kelompok yg mendapat pendampingan mmg harus di bentuk oleh Warsi sendiri ?

Jawaban : Tidak. Kelompok yang didampingi WARSI tidak harus dibentuk oleh WARSI. Dalam pengalaman kami, sebagian besar justru merupakan kelompok yang sudah ada dan berkembang di masyarakat, seperti Kelompok Perhutanan Sosial, kelompok tani, koperasi, maupun kelompok usaha yang telah memiliki inisiatif sendiri.

Pendampingan biasanya dimulai dari identifikasi potensi, kebutuhan, serta kesesuaian dengan wilayah dan program yang sedang kami jalankan. Jadi yang menjadi pertimbangan bukan siapa yang membentuk kelompoknya, tetapi apakah terdapat tujuan bersama dan peluang untuk dikembangkan melalui pendampingan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan menjajaki peluang kolaborasi sesuai dengan program yang sedang berjalan.

3. Linda Wati: Kami punya bank sampah, Bagaimana agar mendapat pendampingan dari warsi?

Jawaban : Apakah dapat didampingi oleh WARSI tentu bergantung pada kesesuaian dengan fokus program. Saat ini sebagian besar pendampingan WARSI berfokus pada pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, termasuk perhutanan sosial, pengembangan usaha berbasis hasil hutan, agroforestri, serta penguatan kelembagaan



masyarakat.

Namun demikian, jika terdapat irisan dengan pengelolaan lingkungan, ekonomi sirkular, atau pengembangan usaha masyarakat, tentu peluang kolaborasi tetap terbuka.

4. Vanpraz: untuk dukungan permodalan dan pemasaran hasil KUPS apakah WARSI juga melibatkan Lembaga ekonomi desa seperti bumdes dan koperasi?

Jawaban: Tentu saja. Justru salah satu pembelajaran yang kami peroleh adalah bahwa pengembangan usaha masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, WARSI selalu berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai kelembagaan ekonomi yang sudah ada di tingkat lokal, termasuk koperasi, BUMDes, pemerintah desa atau nagari, pelaku usaha, offtaker, dan pemerintah daerah. Hal ini pernah kami lakukan di beberapa desa/nagari di Sumatera Barat dan Jambi.

Peran masing-masing tentu disesuaikan dengan konteks wilayah. Ada yang berperan dalam penguatan kelembagaan, pemasaran, akses pembiayaan, hingga pengembangan rantai nilai.

Prinsipnya, kami tidak ingin membangun sistem yang berjalan sendiri, tetapi memperkuat ekosistem yang sudah ada agar kelompok usaha memiliki dukungan yang lebih berkelanjutan.

5. Cut Aziza : izin bertanya kepada bang ryan terkait dengan pendekatan apa yang dilakukan untuk pemasaran suatu produk dalam melakukan branding, pengenalan produk kepada pasar dan bagaimana proses pemasaran sebuah produk tersebut baik di pasar lokal maupun nasional, dan apa tantangan yang dihadapi serta bagaimana solusi dari menjawab tantangan tersebut? mungkin bisa membawa salah satu contoh dari KUPS yang sudah dilakukan sebelumnya.

Jawaban : Untuk pemasaran bisa kita mulai dari pasar yang dekat dengan komunitas yang mudah dijangkau. Biasanya kita mengajak kelompok masyarakat untuk melihat pasar yang dekat / pasar lokal. Namun demikian untuk perluasan dan pengembangan usaha kita juga tetap mendorong pendekatan digital marketing dengan melakukan pendampingan pembuatan kemasan yang menarik dan aman untuk kesehatan, ketahanan dalam distribusi, legalitas produk untuk keamanan konsumen, dan promosi melalui sosial media. Walau banyak platform namun masyarakat masih terbatas pada Whatsapp, namun demikian juga melakukan promosi di akun tiktok dan instagram. Tentu saja keterlibatan pemuda di dalam kelompok sangat membantu proses digitalisasi untuk pemasaran ini.

6. Nur Hazzah : Terkait pola pendampingan WARSI, kira2 apa saja karakter masyarakat binaan yang menghambat program dan bagaimana cara WARSI menghadapinya? karena hal ini cukup signifikan dalam pengelolaan kelembagaan dan akan ada seleksi alam pada kelompok sehingga pada akhirnya program hanya dipegang oleh satu/dua orang yang bertahan.



Jawaban : Kebanyakan akan terjadi pola euforia diawal, semua orang bersemangat dan banyak yang ingin bergabung menjadi kelompok usaha, tanpa mengetahui esensi berkelompok dan tujuan bersama yang akan dicapai. Tantangan ini Warsi kelola dengan terus berdialog di ruang ruang publik di desa maupun berdiskusi dalam ruang FGD untuk membangun pola pikir kritis dan kesadaran bersama akan tujuan, tanggungjawab yang akan dipikul oleh anggota kelompok, upaya yang perlu dilakukan bersama, resiko dan peluang yang mungkin muncul dan akan dihadapi. Proses ini secara alamiah akan menyeleksi orang-orang yang benar-benar ingin terlibat serta berkontribusi dalam penyelenggaraan usaha kelompok itu sendiri.

7. @wellyariyanto8863 di youtube: ijin bertanya, apakah pendampingan masyarakat oleh kki warsi dapat dilakukan kepada warga/kelompok masyarakat di luar kawasan hutan?

Jawaban : Pada prinsipnya pendampingan warsi pada kelompok PS, tapi tidak menutup kemungkinan kelompok diluar kawasan hutan bisa di dampingin juga, tapi tentu dilihat dahulu kemana arah yang dituju apakah selaras atau tidak, kita juga akan melihat peluang kolaborasi skema apa yang cocok.

8. @harismantowo2525 di youtube: apa kelompok bs mengakses dana bank? Trims

Jawaban : Tentu bisa dan dilihat juga dari usaha yang dilakukan oleh kelompok, tentu yang perlu dipastikan kesiapan kelompoknya dan ini juga menjadi PR besar untuk kita.

Ditujukan kepada Dr. Novriyanti, S.Hut, M.Si – Akademisi

1. Shindung : Terkait dengan tren penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan beberapa tahun terakhir dalam hal serapan Tenaga Kerja, maka mekanisme PS dapat mendongkrak peningkatan/perlambatan seberapa besar? dan turut menahan kontribusi ekonomis terhadap PDRB dan seberapa besar? serta bagaimana proyeksi keberlanjutan tren positif yang telah berjalan?

Jawaban : Saya belum punya angka pasti untuk kasus spesifik ini. Ini pertanyaan yang butuh dua hal berbeda: (1) angka besaran riil dari tren dan dampaknya, perlu data spesifik wilayah studi yang dipilih/jadi konsen dan (2) kerangka konseptual bagaimana mekanisme PS bisa memengaruhi angka-angka itu.

Pertanyaan pertama, ya pak @Sindhung W. - Nakertrans. Jateng. yaitu tentang penurunan kontribusi sektor ini terhadap serapan tenaga kerja biasanya didorong oleh: (a) transformasi struktural (perpindahan ke sektor jasa/industri), (b) mekanisasi pertanian, (c) alih fungsi lahan. PS bisa menahan laju penurunan ini lewat dua jalur : pertama, penciptaan lapangan kerja baru di KUPS (agroforestri, NTFP/HHBK, ekowisata) yang menyerap tenaga kerja di dalam sektor kehutanan itu sendiri, bukan menggantikannya. kedua, PS memberi insentif ekonomi bagi masyarakat untuk tetap bekerja di sektor kehutanan/agroforestri alih-alih migrasi keluar sektor (rural-urban migration) atau alih



fungsi lahan ke non-pertanian. Untuk mengukur besarnya, hal ini perlu diteliti dengan metode yang jelas. Bisa melibatkan para akademisi, mungkin mahasiswa di kampus tertentu yang dekat dengan lokasi yang menjadi konsen.

Pertanyaan ke 2 dan 3, bagaimana dan seberapa besar kontribusi PS menahan penurunan PDRB sektoral dan proyeksi keberlanjutan tren positif, sebenarnya bukan ranah riset saya, dan nampaknya perlu data yang pasti ya supaya bisa pas jawabannya. Artinya, kita butuh lagi risetnya. Tapi mungkin pemerintah sudah punya data globalnya, dan itu perlu diakses mungkin melalui BPS ya.

2. KUPS : Untuk Bu Novri, nilai dari metode TEV ini sepertinya tidak selalu selaras dengan keberhasilan kelompok usaha jikalau hanya dilihat dari nilai transaksional yang dapat menjadi catatan kesejahteraan anggota, selain pengukuran nilai NTE, metode apa yang sesuai untuk pencatatan nilai kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban : Ya, benar, tidak selalu selaras dengan keberhasilan kelompok usaha, bahkan tidak juga menggambarkan kesejahteraan rata-rata anggota, jika hanya dilihat dari nilai transaksi ekonominya, sehingga kita HARUS menilai juga aspek lainnya. Berikutnya, soal TEV, maksudnya selain pengukuran dengan TEV ya, bukan NTE; TEV itu ada banyak komponennya, kalau dikelompokkan, hanya menjadi 2: nilai guna dan nilai non-guna (nilai tapi tidak digunakan sekarang/saat ini). Nah, penilaian kesejahteraan ekonomi salah satunya bisa menggunakan pendekatan willingness to pay/accept (WTP/WTa) atau biasanya disebut surplus produsen/konsumen dengan metodenya namanya CVM (contingent valuation method).

3. Nurfianto Giar : Pertanyaan kepada Bu Novriyanti, bagaimana pengembangan usaha dan komoditas berkelanjutan pada Kawasan NKT?

Jawaban : Pertanyaan ini di luar dari apa yang saya presentasikan. Tapi, untuk mencoba menjawab, mungkin bisa ditelusuri dulu ya jenis usaha atau calon komoditas potensial di wilayah itu, kemudian pelajari atau dalami modalitas orang-orang di sekitar area NKT itu untuk mengelolanya. Ukuran keberlanjutan itu kompleks, lebih dari 1 faktor atau elemen. Tapi, aspek dalam tiap faktor itu tidak jauh-jauh dari apa dan bagaimana konteks yang terjadi dan tersedia di masyarakat atau tingkat tapak. Jadi berbeda ya bu konsep pengelolaan Kawasan NKT dan Perhutanan Sosial?

Ditujukan kepada Addrison Datuk Gadiang - KUPS Tarusan Dalam Mandiri

1. KUPS : Teruntuk Inyik Datuk tadi dijelaskan bahwa sudah ada kerjasama dengan SuCa, adakah tantangan tertentu yang dialami kelompok untuk dapat menyesuaikan permintaan kebutuhan dan keinginan dari SuCa? Bagaimana cara pengelolaan kelompok hingga dapat memenuhi tiap ekspektasi offtaker? Baik dari permintaan produksi tertentu, kualitas, dll...



Jawaban : Tantangan sangat banyak cuma ada beberapa point yang bisa kami sampaikan.

- 1) Masalah dukungan sehingga pertumbuhan tanaman ada sedikit mengalami gangguan, ada pertumbuhan kayu liar dengan tanaman yang datang dari alam itu sangat jauh berbeda dengan perlakuan khusus, kalau tumbuhan liar melalui angin dan melalui hewan seperti tupai dan musang, jadi itu pertumbuhannya sangat signifikan.
- 2) Pertumbuhan kopi yang ditanam sedikit terganggu karena kekurangan suplai terhadap tanaman itu sendiri
- 3) Penguatan atau pengatur manajemen usaha dan kelembagaan kelompok
- 4) Tidak memiliki pasar yang berkelanjutan dan pasar yang jelas, perlu kiranya melakukan perluasan mitra kerja, baik terhadap opd terkait dan mitra lain seperti bapak angkat
- 5) Perizinan yang belum lengkap untuk meningkatkan kepercayaan kelompok
- 6) Tentang kemasan yang masih sederhana belum optimal dalam mendukung daya saing untuk mendukung produk yang sudah dihasilkan
- 7) Modal kerja yang masih terbatas, mungkin saat ini kami punya semangat tapi terkendala modal yang terbatas
- 8) Tantangan dunia saat ini kapasitas kami dalam pasar digital belum mendukung karena sumber daya terbatas

Ditujukan kepada Apri Dwi Sumarah, S.Hut., M.Sc., M.S.E - Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI

1. KUPS : Bapak, untuk KUPS gold salah satu penjelasan adalah menghasilkan nilai tambah, indikatornya spt apa pak? karena kalau hanya menambah penghasilan itu sudah terjadi, catatan keuangan juga sudah ada. Akses pasar ada namun belum berkelanjutan. Kemudian dikelola secara profesional itu bagaimana indikatornya ya pak? Jikalau kita sudah merasa dapat naik ke gold, apakah KUPS yang akan mengajukan kenaikan, atau ada lembaga lain yang dapat mengajukan dan verifikasi ya?

Jawaban :

A: Klasifikasi KUPS sesuai Permen 9/2021

- a. sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau silver;
- b. sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan;
- c. sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/atau pinjaman; dan
- d. sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal

Usulan kenaikan Kelas KUPS dilakukan oleh Kepala Balai PS kepada Dirjen PS, KUPS/pendamping dapat mengusulkan kepada Kepala Balai PS



2. Nurfianto Giar : Selamat siang, saya ingin bertanya Pak Apri, 1) Bagaimana Kemenhut menjamin seluruh KUPS menjaga ekosistem hutan mereka dalam konsep agroforestry dan menjamin lahan mereka tidak pada lahan deforestasi (tentang kebijakan EUDR)? 2) Bagaimana strategi peningkatan kapasitas petani hutan dan fasilitas pembiayaan di tengah perbankan dan Lembaga keuangan yang enggan memberikan kredit pada factor ketidakpastian tinggi pada usaha kehutanan dan pertanian? Apakah KUPS dapat menjadikan petani dan pelaku usaha lebih reliable di mata mereka? Terima kasih

Jawaban :

- 1) Kelestarian ekosistem KPS dituangkan dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial, dengan tiga pilar kelola: Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Pola agroforestry diimplementasikan dalam RKPS a.l: Menentukan tata letak spasial, komposisi jenis, dan tingkat kerapatan pohon kayu/MPTS; Pola Tanam Komplementer untuk mengatur penataan komoditas berdasarkan waktu panen agar KUPS memiliki *cash flow* yang stabil.
- 2) Perhutanan sosial sebagai salah satu langkah perbaikan ekosistem melalui pola agroforestry sehingga lahan (mungkin beberpa areal eks deforestasi) dapat dipulihkan kembali sehingga menjadi bukti bahwa PS mampu memperbaiki ekosistem.
- 3) Strategi Peningkatan Kapasitas & Pembiayaan Alternatif:
 - a. Transformasi Kelembagaan & Literasi Keuangan Tapak melalui Pendampingan IntensifâPendamping Perhutanan Sosial, Penyuluh LHK, dan LSMâKUPS didampingi mengadopsi pencatatan keuangan tersandar (buku kas, akuntansi digital sederhana) serta penyusunan Feasibility Study (FS) bisnis yang layak bank (bankable).
 - b. Mendorong KUPS bertransformasi dari sekadar kelompok tani menjadi entitas berbadan hukum (Koperasi).
 - c. Mengoptimalkan skema KUR Klaster yang menggandeng *offtaker* (pembeli siaga) sebagai penjamin pembelian (*offtake agreement*) sekaligus pemicu kucuran kredit perbankan.
 - d. Mendorong akses Fasilitas Dana Bergulir BPD LH, jaminan bisa dari tegakan tanaman yang ada

Ditujukan kepada Suryono – CEO PT. Alko Sumatera Kopi

1. Nurfianto Giar : Selamat siang, saya ingin bertanya Pak Suryono, bagaimana model bisnis dan manajemen operasional agroforestry kopi berbasis Multi-usaha Kehutanan dan Bagaimana mengatasi masalah fragmentasi lahan petani yang kecil-kecil agar agregasi



volume produk memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang diminta oleh industri besar atau pasar ekspor? Terima kasih

Jawaban : model bisnis nya dimulai dari kelompok tani, ke kolektor (koperasi) lalu ke exportir dan aplikasi ini bisa untuk multi komoditas, lahan yang kecil justru sangat cocok dengan aplikasi Qthink-X Karena bisa membuat traceability nya dan memiliki nilai berbasis lokasi. produksi yang kecil dengan konsolidasi dan ter traceability dengan baik akan bernilai lebih, dan ini justru jadi nilai buat industri besar dan diminati.

2. KUPS : Bagaimana cara membuat penjualan atau pemasaran kita bisa spt website Qthinkx tadi ya pak? apakah bisa dibantu pembuatannya atau teknisnya bagaimana ya?

Jawaban : daftar di www.qthinkx.com dan akan terkoneksi dengan berbagai pembeli kopi dalam jaringan.

Ditujukan kepada Destamal S.T, M.Eng - Sekretariat Pokja PPS Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

1. Nurfianto Giar : Selamat sore, saya ingin bertanya Pak Destamal, 1) Mengingat metode tradisional pengolahan gambir sering kali membutuhkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk proses perebusan daun, sejauh mana eksploitasi kayu hutan untuk energi ini dapat merusak kawasan hutan dan seperti apa daya dukung lingkungan sekitar kebun gambir? 2) Bagaimana peran pemerintah daerah dan dinas terkait dalam melakukan pengawasan, pendampingan teknis budidaya ramah lingkungan, serta memfasilitasi akses pembiayaan langsung bagi petani gambir agar terlepas dari jeratan ijon tengkulak? Terima kasih

Jawaban : gambir 80% dari 100% di Indonesia itu berada di kabupaten 50 kota. Saat ini proses pengolahannya masih tradisional, kayu pembakaran diambil dari sekitar hutan. Pemerintah saat ini sedang mengusahakan hilirisasi gambir tidak ditingkat petani, namun dibuat oleh koperasi/investor namun tetap melibatkan para petani gambir. Sehingga praktik penebangan kayu bakar untuk pengolahan gambir tidak terjadi lagi. Lalu di KPH juga selalu berupaya untuk sosialisasi larangan penebangan dan juga dihimbau untuk melakukan penanaman tanaman kayu juga dengan sistem agroforestry. Dalam praktiknya butuh juga kolaborasi dengan teman-teman pendamping untuk akselerasi. (2) pemerintah



daerah selalu mencari peluang pendanaan untuk membantu masyarakat baik perbankan maupun non perbankan. Kalo nanti ada sistem bapak angkat yang kita cari untuk berusaha menunjukkan masyarakat ini bisa menjadi anak angkatnya. Kemudian melalui perbankan kita sedang giat untuk mendorong perizinan halal financing untuk masyarakat.